

## BAB 7

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. Simpulan

Mengacu pada tujuan penelitian ini dan jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam bab “pembahasan hasil” dapat diambil beberapa kesimpulan:

- (1) Secara umum, berdasarkan hasil observasi di lapangan kinerja lumbung pangan desa (LPD) yang ada di desa-desa tertinggal sangat rendah, sehingga tidak membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya
- (2) LPD di desa-desa tertinggal perlu diperluas fungsi dan perannya, sebagaimana yang direkomendasikan penelitian ini dalam bentuk model “Model Revitalisasi Fungsi dan Peran Lumbung Pangan Desa” (lihat, gambar 5.1.). Hal ini sesuai amanat UU No 6 tentang Desa, dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (3) BUMD tersebut bisa didirikan di desa-desa tertinggal dalam bentuk usaha Baitul Mall Tamwil Desa (BMT-D)

#### 7.2. Implikasi Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani adalah sebagai berikut: Pertama, kebijakan yang berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan (petani) sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional. Kebijakan tersebut meliputi *land reform policy*. *Land reform policy* ini bertujuan agar para

petani memiliki luas lahan yang memberikan keuntungan untuk dikelola sekaligus meningkatkan produktivitas usaha taninya. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini dapat direalisasikan dalam wujud pembangunan areal pertanian baru yang luas di luar Jawa untuk dibagikan kepada buruh-buruh tani (petani tanpa lahan), para petani gurem (petani berlahan sempit), para peladang berpindah, dan perambah hutan yang diikuti dengan bimbingan budi daya pertanian secara modern serta mekanisasi pertanian berorientasi komersial (agrobisnis). Dalam skala makro, pemerintah juga harus mendorong kebijakan harga yang fair. Dalam hal ini sangat penting adanya kebijakan harga dasar yang efektif dan penerapan tarif impor secara simultan. Tetapi, tidak cukup hanya itu. Hendaknya semua parasit ekonomi pertanian seperti penyelundup, tengkulak, pengijon, preman desa, rentenir, elite desa dan kota, serta para birokrat yang terlibat dalam aktivitas langsung dan kebijakan di lapangan supaya dibersihkan, baik keberadaan maupun perilaku mereka. Sebab, kalau tidak, kenaikan harga pangan tidak akan dinikmati petani, tetapi oleh para parasit ekonomi tersebut. Kebijakan berikutnya adalah peningkatan akses petani terhadap kredit dan perbaikan kualitas pelayanan kredit, menghilangkan lembaga pencari rente dan kelompok *free rider*, serta sebanyak mungkin memberikan dana berputar atau pinjaman lunak untuk perbaikan sarana penyimpanan, transportasi, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan akses terhadap input produksi penting seperti pupuk dapat diwujudkan dengan menerapkan kembali kebijakan subsidi pupuk. Selain itu, pemerintah pusat perlu membuat memorandum of understanding dengan pemda-pemda yang memiliki lahan-lahan pertanian subur (irigasi) untuk tidak mengizinkan alih fungsi lahan-

lahan tersebut. Dan, yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah introduksi agroindustri pedesaan.

Kebijakan kedua adalah kebijakan yang berorientasi menjaga aspek keterjangkauan pangan yang meliputi pemetaan wilayah-wilayah yang potensial rawan pangan dan perbaikan akses serta ketersediaan logistik ke wilayah-wilayah tersebut. Juga sangat penting untuk menerapkan program perlindungan sosial berkala berupa program OPK (operasi pasar khusus) dan raskin (beras untuk rakyat miskin) sebagai sarana indirect income transfer untuk kelompok-kelompok miskin kronis. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan per daerah tingkat II tentang jumlah dan sebaran kelompok tersebut. Pemetaan ini penting agar program perlindungan sosial ini dapat tepat sasaran. Kemudian juga harus dilakukan kebijakan diversifikasi pangan. Kebijakan ini bertujuan membiasakan rakyat mengonsumsi makanan sehari-hari dari berbagai jenis pangan. Dengan terwujudnya kebiasaan makan yang baru tersebut, ketergantungan terhadap salah satu komoditas pangan dapat direduksi. Di era desentralisasi ini, untuk mengaplikasikan kebijakan ini pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar terwujud kebijakan panganekaragaman pangan nasional yang berbasis lokal. Alternatif kebijakan ini, antara lain, pertama, pengembangan resource untuk produksi beragam pangan lokal termasuk dukungan kebijakan harga, riset dan pengembangannya untuk memacu produktivitas komoditas lokal nonberas di daerah. Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal dengan pembinaan kreativitas masyarakat dalam memproduksi, memanfaatkan, dan mengonsumsi

berbagai jenis pangan lokal. Ketiga, pengolahan dan penyediaan berbagai jenis bahan pangan dalam bentuk siap olah untuk masyarakat daerah.

Kebijakan ketiga adalah kebijakan yang berorientasi menjaga stabilitas ketahanan pangan antarwaktu (musim). Kebijakan ini meliputi, pertama, impor yang selektif dengan impor pangan tertentu hanya diizinkan untuk daerah-daerah yang bukan terkategori sentra produksi pangan tersebut dan tidak dilakukan dalam keadaan panen raya. Kedua, kebijakan yang bertujuan bagaimana melibatkan masyarakat dalam fungsi mekanisme penyeimbang logistik antarmusim melalui lembaga logistik tradisional yang dikenal dengan nama lumbung desa. Hal ini penting mengingat di era mendatang kemampuan lembaga logistik nasional (Bulog) yang semakin berkurang sebagai penyeimbang logistik antarmusim. Lumbung desa adalah institusi stok pangan lokal yang dulu cukup efektif sebagai penyangga ketahanan pangan (buffer stock) masyarakat.

### **7.3. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti tidak berpretensi bahwa penelitian tentang ketahanan pangan ini, telah menghasilkan output penelitian yang sempurna ke-akurasian-nya, namun ada beberapa keterbatasan yang bisa diidentifikasi yaitu:

- (1) Penelitian tidak memasukkan variabel “kualitas makanan dan nutrisi” yang merupakan komponen penting dalam mengidentifikasi ketahanan pangan rumah tangga.
- (2) Penelitian yang dilakukan hanya sebatas identifikasi ketahanan pangan, belum bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di daerah penelitian.

- (3) Hasil penelitian belum mendeskripsikan bagaimana memformulasikan sebuah model pengelolaan ketahanan pangan untuk mengatasi kerentanan rumah tangga terhadap pangan di daerah penelitian.

#### **7.4. Saran Penelitian Selanjut-nya**

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah di-identifikasi-kan tersebut, peneliti mengharapkan kepada peneliti berikut-nya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Memasukkan variabel “kualitas makanan dan nutrisi” dalam analisis tentang ketahanan pangan
- (2) Kemungkinan dimasukkan analisis statistik (model regresi) dalam desain penelitian berikutnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.
- (3) Proses dan prosedur penelitian diarahkan untuk hasil temuan bagaimana mem-formulasi-kan sebuah model pengelolaan ketahanan pangan untuk mengatasi kerentanan rumah tangga terhadap pangan di daerah penelitian.